BAB III DESKRIPSI WILAYAH

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan



Gambar 3.1 Peta Kabupaten Lamongan

Sumber: http://skala.lamongankab.go.id

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah $\pm 1.752,21~\text{km}^2$ atau setara dengan 175.221 Ha atau $\pm 3.67\%$ dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Mempunyai panjang garis pantai sepanjang 47 km dan dilewati oleh Sungai Bengawan Solo sepanjang ± 68 Km. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dengan rincian sebanyak 462 Desa dan 12 Kelurahan.

Secara astronomis, Kabupaten Lamongan terletak pada koordinat 6°51'54''-7°23'6'' Lintang Selatan dan berada di antara 112°4'41''-112°33'12'' Bujur Timur.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi, Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto
- d. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gresik

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik sebagai berikut:

- a. Bagian Selatan dan Utara, adalah daerah pegunungan kapur berbatuan yang memiliki tingkat kesuburan yang sedang. Kawasan ini meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokoro
- Bagian Tengah-Selatan, adalah dataran rendah yang relatif subur dan membentang mulai dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, Kembangbahu dan Sugio
- c. Bagian Tengah-Utara, adalah daerah Bonorowo yang merupakan daerah produktif akan tetapi termasuk dalam kawasan yang rawan banjir. Kawasan ini mencakup Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamongan digunakan sebagai kawasan Peruntukan lainnya seluas 4.877 Ha. Kemudian juga terdapat kawasan hutan produksi seluas 31.437,57 Ha, sedangkan luas kawasan untuk permukiman adalah 30.263 Ha.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan jumlah warga miskin mengalami kenaikan hingga 0,64%, yang sebelumnya yakni pada tahun 2019 jumlah kemiskinan di Kabupaten Lamongan mencapai 13,21% dan pada tahun 2020 menjadi 13,85%. Namun pada tahun-tahun sebelumnya jumlah kemiskinan di Kabupaten lamongan berhasil menurun, hal ini terjadi sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan mencapai 15,38%, tahun 2016 menjadi 14,89%, di tahun 2017 menjadi 14,42%, di tahun 2018 menjadi 13,80, kemudin di tahun 2019 sampai pada angka 13,21%.

Tabel Table 4.4.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan, 2012–2019

Poverty Gap Index and Poverty Severity Index in Lamongan Regency, 2012–2019

Tahun <i>Year</i>	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2012	1,92	0,36
2013	2,00	0,40
2014	2,40	0,55
2015	2,25	0,58
2016	2,40	0,66
2017	2,53	0,66
2018	2,83	0,86
2019	2,53	0,67

Catatan/Note:

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Tabel 3.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan berdasarkan Badan Pusat Statistik Lamongan.

Dari data yang diberikan oleh pihak BPS Kabupaten Lamongan, data warga miskin di Kabupaten Lamongan per tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Penduduk Miskin	Kelas		
1.	Sukorame	8.656	Tinggi		
2.	Bluluk	5.491	Tinggi		
3.	Ngimbang	11.180	Tinggi		
4.	Sambeng	10.661	Tinggi		
5.	Mantup	8.156	Tinggi		
6.	Kembangbahu	14.840	Tinggi		

	Jumlah	314.006	Tinggi
27.	Brondong	5.840	Tinggi
26.	Paciran	5.016	Tinggi
25.	Solokuro	4.380	Tinggi
24.	Laren	11.978	Tinggi
23.	Maduran	7.713	Tinggi
22.	Sekaran	9.896	Tinggi
21.	Karanggeneng	9.734 –	Tinggi
20.	Kalitengah	9.482	Tinggi
19.	Turi	18.220	Tinggi
18.	Karangbinangun	12.691	Tinggi
17.	Glagah	12.385	Tinggi
16.	Deket	10.520	Tinggi
15.	Sarirejo	6.345	Tinggi
14.	Tikung	9.458	Tinggi
13.	Lamongan	8.900	Tinggi
12.	Sukodadi	18.276	Tinggi
11.	Pucuk	15.961	Tinggi
10.	Babat	27.481	Tinggi
9.	Modo	11.570	Tinggi
8.	Kedungpring	19.124	Tinggi
7.	Sugio	20.051	Tinggi

Tabel 3.2 Data Warga Miskin Di Kabupaten Lamongan

3.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Lamongan



Gambar 3.2. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan merupakan pihak yang menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan pada bidang Kesejahteraan Sosial. Lembaga pemerintahan pusat dari Dinas Sosial dipimpin oleh Kementerian Sosial. Dalam artian lain, Dinas Sosial merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial. Berdasarkan informasi kelembagaan Kementerian Sosial, Kementerian Sosial adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial.

Adapun visi yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yakni "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong". Sedangkan misi yang dimiliki untuk mewujudkan visi Kementerian Sosial yakni "Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera".

Selanjutnya bidang sosial pada tingkat kabupaten atau kota ditangani dan menjadi bagian tanggungjawab dinas pada masing-masing daerah. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan merupakan instansi pemerintah daerah yang menjadi perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial di wilayah Kabupaten Lamongan. Kebijakan yang diaplikasikan merupakan kebijakan yang disesuaikan dengan otoritas daerah. Dinas

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3.3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Lamongan. Adapun UHAMA susunan organisasi dinas sosial terdiri atas:

- Kepala Dinas; 1.
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- Bidang Rehabilitasi Sosial;
- Bidang Pemberdayaan Sosial;
- Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- UPTD; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

MALA